

DINAMIKA SUMBER-SUMBER KEKUASAAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA: DARI MITOS MENUJU PERTUKARAN SOSIAL

Ciptono¹

¹Universitas Sunan Bonang Tuban

¹ciptono.101265@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v5i1.4404>

Received: 5 Mei 2025

Revised: 5 Mei 2025

Accepted: 14 Mei 2025

Abstrak

Pemilihan kepala desa di Indonesia memiliki sejarah panjang, dibanding dengan pemilihan kepala daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan sumber-sumber kekuasaan oleh kandidat dalam pemilihan kepala desa di Desa Sumberarum dari waktu ke waktu. Metode penelitiannya adalah metode longitudinal dengan masa penelitian mulai Pilkades 1999 sampai 2019. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi. Periodeisasi penelitian difokuskan pada masa kepemimpinan trah Kromo Baru, berakhirnya oligarki trah Kromo Baru, dan terpilihnya kepala desa Sumberarum dari luar trah Sambong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bertahannya kepala desa dari trah Kromo Baru selama lebih dari 1 abad karena adanya mitos-mitos yang dikembangkan untuk mempertahankan kekuasaan di tingkat desa. Bertahannya dinasti trah kromo Baru dalam kepemimpinan di Desa Sumberarum dikarenakan faktor geneologi, kultural dan sosiologis. Faktor geneologi, kepala desa Sumberarum dipimpin oleh Kromo Baru (1902) sampai dengan Muniroh (2013-2019) yang merupakan satu kerabat. Faktor kultural dapat dicermati dari dikembangkannya mitos dan sakralisasi benda-benda peninggalan, seperti, ageman, keris, thontongan, dan kimo gelung mbah Kromo Baru yang dianggap sebagai sarana dalam mempertahankan kekuasaan. Selain sakralisasi benda-benda pusaka, keturunan trah Kromo Baru yang mengikuti pemilihan kepala desa, juga menggunakan 'orang pintar' atau dukun. Runtuhnya kekuasaan trah Kromo Baru karena kegagalan dan kelemahan kepala desa perempuan cicit menantu trah Kromo Baru, yaitu Muniroh. Tampilnya kepala desa Sumberarum dari luar trah Kromo Baru, menandai penggunaan sumber-sumber kekuasaan yang tidak lagi mengandalkan pada mitos-mitor yang berkembang selama lebih dari 1 abad, tetapi juga menggunakan sumber kekuasaan material. Penggunaan sumber material seperti pemberian sembako, uang, kaos, dan uang, menandai adanya pergeseran perilaku pemilih yang lebih rasional dan transaksional.

Kata kunci: Sumber kekuasaan, Pemilihan kepala desa, Mitos, Pertukaran Sosial

Abstract

Village head elections in Indonesia have a long history, compared to regional head elections. The purpose of this study is to describe the use of sources of power by candidates in village head elections in Sumberarum Village from time to time. The research method is a longitudinal method with a research period starting from the 1999 Pilkades to 2019. Data were collected through documentation studies, in-depth interviews, and observations. The research periodization focused on the leadership period of the Kromo Baru lineage, the end of the Kromo Baru lineage oligarchy, and the election of the Sumberarum village head from outside the Sambong lineage. The results of the study show that the survival of village heads from the Kromo Baru lineage for more than 1 century is due to the existence

of myths that were developed to maintain power at the village level. The survival of the Kromo Baru lineage dynasty in leadership in Sumberarum Village is due to genealogical, cultural and sociological factors. Genealogical factors, the Sumberarum village head was led by Kromo Baru (1902) to Muniroh (2013-2019) who were one relative. Cultural factors can be observed from the development of myths and the sacralization of heirlooms, such as ageman, keris, thontongan, and kimo gelung mbah Kromo Baru which are considered as a means of maintaining power. In addition to the sacralization of heirlooms, descendants of the Kromo Baru lineage who participate in the village head election also use 'smart people' or shamans. The collapse of the power of the Kromo Baru lineage was due to the failure and weakness of the female village head, the great-granddaughter-in-law of the Kromo Baru lineage, namely Muniroh. The emergence of the Sumberarum village head from outside the Kromo Baru lineage, marks the use of sources of power that no longer rely on myths that have developed for more than 1 century, but also use material sources of power. The use of material sources such as providing basic necessities, money, t-shirts, and money, marks a shift in voter behavior that is more rational and transactional.

Keywords: Sources of Power, Village Head Election, Myths, Social Exchange

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa di atur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 sampai dengan pasal 47. Pasal-pasal tersebut memuat aturan tentang kepala desa, mulai dari tugas, wewenang, hak, kewajiban, sanksi, larangan, pemilihan, hingga pemberhentian kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan perwujudan demokrasi lokal di tingkat desa, dengan interaksi antara kandidat dan pemilih yang sangat intens, karena berasal dari desa yang sama. Dibanding dengan interaksi antara kandidat dengan pemilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan legislatif (Pileg), bahkan pemilihan presiden (Pilpres).

Studi tentang pemilihan kepala desa merupakan salah satu studi yang menarik dan penting untuk memahami dinamika politik lokal di pedesaan. Dinamika tersebut dapat berupa persaingan politik yang ketat, meningkatnya partisipasi publik, dan perubahan komunikasi politik melalui media sosial (Hargono dkk, 2024). Dinamika politik pemilihan kepala desa, dapat mengarah pada konflik pemilihan kepala desa. Konflik pemilihan kepala desa mencerminkan kompleksitas politik lokal

yang melibatkan dimensi struktural, kultural, dan personal (Kasmat dkk, 2025).

Dinamika politik lokal yang terjadi pada pemilihan kepala desa menimbulkan polarisasi dalam struktur masyarakat desa (Resky dkk, 2023). Pemilihan kepala desa masih meninggalkan bekas berupa keretakan hubungan antar masyarakat yang masih memiliki ikatan kekeluargaan yang erat. Dinamika tersebut terjadi dalam tiga fase yaitu pra pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pasca pemilihan.

Pemilihan kepala desa bukan sekedar perebutan kekuasaan dalam rangka suksesi kepemimpinan di desa, tetapi lebih dari itu menyangkut penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat atau pemilih dan juga adanya dinamika oligarki di tingkat desa. Kepala desa menggunakan sumber daya material selain sumber kekuasaan Jawa yang bersifat spiritual. Penggunaan uang dan penguasaan institusi formal sebagai karakter dasar oligarki ternyata kurang efektif untuk meraup jumlah suara yang signifikan dalam pemilihan kepala desa. Sebaliknya, semakin banyak sumber kekuasaan nonmaterial yang digunakan kandidat kepala desa maka semakin besar pula kemungkinan terpilihnya (Hidayat dkk, 2018). Praktik politik uang pada pemilihan

kepala desa dinilai mengancam demokrasi di tingkat lokal. Politik uang dapat menghambat kualitas demokrasi di desa dan memengaruhi gagasan membangun demokrasi secara menyeluruh (Fariaty dkk, 2023).

Ada banyak mitos dan perilaku spiritual yang menjadi sumber kekuasaan kandidat untuk memenangkan pemilihan kepala desa. Beberapa mitos yang berkembang dalam pemilihan kepala desa di antaranya menanti turunnya '*andaru*' atau '*pulung*'. Ada semacam mitos, andaru atau pulung yang dipersepsikan berbentuk bola api, jatuh di rumah salah satu kandidat maka dialah yang akan jadi pemenang. *Andaru* atau *pulung*, menurut cerita yang beredar biasanya turun pada dini hari, dari pukul 00.00 WIB hingga menjelang subuh. Selain keyakinan akan mitos, kandidat kepala desa juga menggunakan dukun atau 'orang pintar' untuk memenangkan pemilihan kepala desa (Irawan & Rochmiatun, 2022; Hidayat dkk, 2018).

Pada umumnya kegiatan yang dilakukan oleh para kandidat saat mendatangi dukun adalah meminta restu dan izin. Biasanya saat mendatangi dukun, kandidat kepala desa memiliki beberapa pertanyaan mengenai hal yang harus mereka lakukan supaya memenangkan pemilihan kepala desa dan menanyakan pendapat dukun seberapa besar peluang kemenangan kandidat kepala desa tersebut. Saat mengunjungi dukun, ada ritual khusus yang harus dilakukan oleh kandidat kepala desa. Sumber kekuasaan nonmaterial tersebut identik dengan kekuasaan Jawa berasal energi mistis kesakten yang berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan diri kontestan dalam menghadapi pemilihan. Dengan demikian, peranan sumber kekuasaan material dan sumber kekuasaan nonmaterial dalam kontestasi politik di tingkat desa tidak sama atau bertolak belakang dengan kontestasi politik di tingkat kabupaten, kota, provinsi dan nasional.

Selain kandidat kepala desa, warga masyarakat sebagai pemilih juga masih memegang kepercayaan kehadiran dukun dalam pemilihan kepala desa (Hatimah dkk, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa, warga masih memegang kepercayaan bahwa ada kehadiran dukun di setiap pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa, para kandidat mengembangkan sistem kepercayaan untuk membentuk sikap sosial dan politik. Dalam praktiknya dukun mengandalkan penalaran mistik sebagai landasan kemampuannya dan memanfaatkan perangkat mistik yang dimilikinya. Dukun digunakan sebagai pedoman untuk maju, berapa persen kemenangan yang diinginkan dan sebagai jaringan politik pemilihan kepala desa dan menanamkan pengaruh terhadap warga sehingga mereka mendapat dukungan massa yang dimiliki dukun untuk tujuan politiknya.

Hasil penelitian Rahma dkk (2023) menunjukkan bahwa perumusan kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dipengaruhi oleh sejumlah faktor politik. Pertama, faktor internal meliputi aspirasi politik kepala desa yang ingin memperpanjang masa jabatannya untuk melanjutkan program pembangunan yang telah dimulai. Kedua, faktor eksternal meliputi intervensi politik dari partai politik lokal atau kelompok kepentingan tertentu yang ingin mempertahankan atau mengubah kekuasaan di tingkat desa.

Salah satu motif yang mendorong penelitian ini adalah untuk memahami tentang mitos-mitos yang berkembang pada pemilihan kepala desa, penggunaan sumber kekuasaan, dan dinamika yang terjadi. Mitos dan penggunaan sumber kekuasaan spiritual dalam kekuasaan Jawa dapat dicermati dari pemilihan kepala desa di Jawa, bahkan di luar Jawa. Studi terdahulu tentang pemilihan kepala desa cenderung dilakukan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa dan hanya pada satu periode pemilihan.

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis pemilihan kepala desa selama 20 tahun atau tiga kali pemilihan kepala desa di Desa Sumberarum. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan jenis longitudinal. Tujuan penelitian ini adalah untuk melacak perubahan-perubahan yang terjadi pada pemilihan kepala desa di Desa Sumberarum selama kurun waktu 20 tahun (1999 – 2019). Penelitian difokuskan pada sumber-sumber kekuasaan tradisional yang ada pada diri kandidat kepala desa dan bentuk-bentuk relasi antara kandidat dengan masyarakat pemilih di Desa Sumberarum dari waktu ke waktu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi longitudinal, sebuah metode dalam ilmu politik yang melibatkan pengamatan berulang terhadap pemilihan kepala desa di Desa Sumberarum Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Metode ini dipilih untuk melacak perubahan dan memahami dinamika fenomena pemilihan kepala desa di Desa Sumberarum. Metode ini dipilih, karena peneliti menjadi bagian dari warga masyarakat Desa Sumberarum dan menjadi pelaku sebagai kandidat kepala desa, kepala desa terpilih, dan kepala desa yang kalah dalam proses pemilihan kepala desa. Rentang waktu penelitian dimulai dari pemilihan kepala desa 1999 sampai 2019 atau pada tiga kepala desa di Desa Sumberarum. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari variabel atau konsep yang berkembang dalam pemilihan kepala desa selama lima periode.

Subyek yang diamati adalah kandidat kepala desa, bentuk-bentuk relasi antara kandidat kepala desa dengan pemilih. Untuk mendapatkan data, peneliti melakukan observasi partisipatif dan berulang pada saat pemilihan kepala desa. Peneliti juga melakukan wawancara secara

mendalam dengan kandidat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pemilih. Selain itu, peneliti menggunakan data tertulis terkait dengan laporan dan hasil penelitian kepala desa di Desa Sumberarum. Untuk melakukan analisis, peneliti melakukan analisis hubungan dinamis antara variabel yang berkembang dalam pemilihan kepala desa. Variabel yang dimaksud adalah figur kandidat kepala desa, latar belakang kandidat kepala desa, bentuk-bentuk pertukaran sosial, dan perilaku pemilih. Perilaku pemilih yang menjadi fokus penelitian ini adalah kebiasaan memilih dan perubahan preferensi politik pemilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mitos Trah Kromo Baru

Mitos merupakan salah satu bentuk pengetahuan yang diperoleh secara lisan dari generasi ke generasi secara berulang. Oleh karena itu hampir semua masyarakat tradisional, termasuk masyarakat Jawa memiliki mitos, yakni ceritera masa lalu yang dikeramatkan karena ceritera tersebut berhubungan erat dengan menata kehidupan bersama (Francisco & Demetrio, 1977; Samuel & Thomson, 1993). Kehidupan masyarakat yang didominasi oleh mistis, merupakan bagian dari peradaban mistis. Peursen (1976) menyebut peradaban mistis sebagai suatu peradaban yang dicirikan oleh pandangan bahwa nasib manusia sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan gaib, sehingga dalam peradaban mistis ini, mitos bisa hidup subur bersamanya. Pandangan mistis dapat ditemukan di hampir semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk mitos dalam kekuasaan.

Mitos yang berkembang dalam Pilkades dan kekuasaan masyarakat Jawa, dapat ditelusuri dari karya Anderson (1972) tentang mitologi dan toleransi

orang Jawa. Anderson memiliki argumen bahwa kekuasaan Jawa memiliki akar pada mitologi yang berkembang di masyarakat dan ritual yang kuat. Dalam pandangan Jawa, kekuasaan raja, kekuasaan kepala desa, tidak hanya bersifat politik, tetapi juga spiritual. Raja dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Dalam kebudayaan Jawa terdapat istilah '*kesakten*' yang identik dengan energi mistis. '*Kesakten*' dalam kekuasaan spiritualitas Jawa, berbeda dengan konsep kekuasaan ala Barat. Konsep kekuasaan Jawa semacam ini masih ditemukan dalam mitos-mitos yang berkembang dalam pilkades di Jawa khususnya. Seorang kepala desa akan memiliki kekuasaan yang besar antara lain apabila dia memperoleh tanda kekuasaan berupa wahyu dari penguasa alam semesta. Tanda-tanda kekuasaan yang diyakini oleh kandidat atau kepala desa di antaranya '*ketiban pulung*'.

Untuk mempertahankan kekuasaan agar terus memusat, seorang raja atau penguasa biasanya melakukan pengekangan diri, antara lain menjauhkan diri dari berbagai hal keduniawian, seperti bertapa, berpuasa, atau melakukan tapabrata (Suseno 2003). Tentu saja, hal-hal tersebut sulit untuk dapat diukur secara kasat mata, seperti halnya kepemilikan harta (uang) atau jabatan formal.

Kebenaran mitos adalah kebenaran yang mengacu kepada fungsi dari mitos itu sendiri, yaitu kesediaan kita untuk menerima bentuk-bentuk kisah dan kemudian kisah itu diteruskan kepada orang lain dengan penuh kesungguhan, sehingga kebenaran objektif dari mitos itu menjadi tidak begitu penting buat masyarakat yang bersangkutan (Peursen, 1976). Sedang kadar dari mitos itu sendiri, bisa beragam, mulai dari cerita dari mulut ke mulut, *gugon tuhon*, sampai kepada cerita yang nampak sakral atau disakralkan karena dikaitkan dengan tokoh-tokoh suci

kendati dimaksudkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan politik kekuasaan.

Mitos kekuasaan kepala desa yang pernah berkembang di Desa Sumberarum adalah kepala Desa Sumberarum berasal dari keturunan Kromo Baru yang pernah menjabat Kepala Desa Sumberarum (1902 – 1906). Kromo Baru merupakan menantu Sambong yang juga pernah menjadi Kepala Desa Sumberarum. Sebelum Kepala Desa Sambong, Desa Sumberarum dipimpin oleh Singo Potro. Hanya saja dalam dokumentasi yang dimiliki Desa Sumberarum, tidak ada informasi yang jelas tentang periode kepemimpinan dan hubungan kekerabatan keduanya. Oleh karena itu, penjelasan tentang oligarki kepemimpinan di Desa Sumberarum dimulai dari trah Kromo Baru. Berdasarkan data dokumentasi yang tersimpan di Desa Sumberarum, sejak kepemimpinan Kromo Baru sampai dengan Ciptono, masih memiliki hubungan kekerabatan berdasarkan geneologi. Pasca kepemimpinan Ciptono, kepala desa digantikan oleh Muniroh (istri Ciptono).

Muniroh menjadi Kepala Desa Sumberarum hanya satu periode (2013-2019), ketika masa jabatan kepala desa hanya enam tahun. Pada saat pemilihan kepala desa tahun 2019, Ciptono mencoba peruntungan untuk menjadi kepala desa lagi, namun dikalahkan oleh calon lainnya, yaitu Narto. Kekalahan Ciptono dalam pemilihan kepala desa ini, menandai runtuhnya trah Kromo Baru dalam kepemimpinan di Desa Sumberarum. Ketiga faktor yang sempat menjadi penguat keberlangsungan trah Kromo Baru, yaitu faktor geneologi, kultural, dan sosiologis, tidak lagi dapat dipertahankan. Pergeseran yang terjadi pada pemilih, dari pemikiran yang tradisional menuju ke rasional. Dari oligarki menuju transaksional, mengakhiri dominasi kepemimpinan dari trah Kromo Baru. Sejak berdirinya Desa Sumberarum sampai sekarang, telah dipimpin oleh sebelas

orang kepala desa dengan masa kepemimpinan yang beragam. Awalnya masa kepemimpinan kepala desa selama delapan tahun dalam satu periode, kemudian berubah menjadi enam tahun, dan berubah lagi menjadi delapan tahun. Kepala desa yang pernah memimpin Desa Sumberarum sebagaimana tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Nama, Periode dan Hubungan Kekeabatan Kepala Desa Sumberarum

No	Nama Kepala Desa	Periode	Hubungan Kekeabatan	Keterangan
1	Singo Potro	-	-	Tdk ada informasi
2	Sambong	-	-	Tdk ada informasi
3	Kromo Baru	1902-1906	Menantu Sambong	
4	Suro Dikromo	1906-1911	Anak dari Kromo Baru	Menjabat 5 tahun
5	Kromo Bongkrang	1911-1916	Anak dari Kromo Baru	Menjabat 5 tahun
6	Kromo Dirman	1916-1946	Anak dari Kromo Baru	Menjabat 30 tahun
7	Hidajat Djooredjo	1946-1990	Cucu dari Kromo Baru	Menjabat 45 tahun
8	Budiono	1991-1999	Cucu dari Kromo Dirman dan cicit dari Kromo Baru	Menjabat 8 tahun (1 periode)
9	Ciptono	1999-2007 2007-2013	Cucu Hidajat Djooredjo	Menjabat 2 periode
10	Muniroh	2013-2019	Istri Ciptono (mantan kades 1999 – 2003)	Menjabat 6 tahun (1 periode)
11	Narto	2019-2027	Tdk ada hub kekeabatan dg kades sebelumnya	Sedang menjabat

Sumber: Dokumentasi Desa Sumberarum

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kepala Desa Sumberarum selama lebih dari 1 abad dijabat oleh kepala desa yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala desa yang bernama Kromo Baru. Kromo Baru merupakan menantu Sambong (Kepala Desa Sumberarum kedua), tidak ada data tertulis tentang masa jabatan Sambong. Setelah masa jabatan Sambong selesai, kepala Desa Sumberarum dijabat oleh Kromo Baru. Selanjutnya secara berturut-turut kepala desa dijabat oleh anak dan cucu Kromo Baru selama lebih dari 100 tahun.

Bertahannya dinasti mbah Kromo Baru dalam kepemimpinan di Desa Sumberarum dikarenakan faktor geneologi, kultural dan sosiologis. Faktor geneologi mbah Kromo Baru berasal dari keluarga terhormat (*wedono*) dan istrinya mbah Kromo dari keluarga kepala desa. Faktor kultural dapat dicermati dari dikembangkannya mitos dan sakralisasi benda-benda peninggalan (seperti, ageman,

keris, thontongan, dan kimo gelung) mbah Kromo yang dianggap sebagai sarana dalam mempertahankan kekuasaan. Selain itu, trah mbah Kromo Baru dikenal sebagai keluarga yang memiliki laku spiritual berupa acara ritual untuk mensakralkan benda-benda peninggalan mbah Kromo Baru. Tidak cukup di situ, keluarga mbah Kromo Baru yang mencalonkan diri sebagai kepala desa juga melibatkan dukun yang ada di desanya ataupun yang di luar desanya.

Faktor sosiologis berkenaan dengan keberadaan kerabat mbah Kromo di desa Sumberarum yang mencapai 70 persen penduduk dan mereka terikat dalam paguyuban atas dasar hubungan darah dan paguyuban atas dasar lokalitas. Jumlah ini memiliki konsekuensi politik pada saat pemilihan kepala desa Sumberarum (Ciptono, 2015). Berbagai bentuk strategi politik yang berbasis pada kekuatan spiritual dibagi menjadi enam kategori: Upacara slametan di makam pendiri desa, layanan *pitou* yang berasal dari pemimpin agama dan dukun, kepemilikan pusaka, *pulung* sebagai legitimasi kekuasaan, dan petungan kalender Jawa.

Ketiga faktor tersebut di atas pada akhirnya melahirkan implikasi politis, yaitu munculnya elit politik dari kerabat mbah Kromo Baru. Elit politik Desa Sumberarum menempati posisi strategis mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun sampai ketua rukun warga. Elit politik desa ini pada akhirnya memberikan warna dalam proses-proses politik, seperti perumusan kebijakan, rekrutmen dan penggalangan massa. Konsekuensi munculnya elit politik di Desa Sumberarum dari kerabat mbah Kromo Baru, memunculkan pola hubungan patron klien. Kerabat mbah Kromo Baru adalah pihak yang berperan sebagai 'bapak' dan warga masyarakat dari luar kerabat mbah Kromo Baru menjadi pihak 'anak' (Ciptono, 2015).

Bertahannya kekuasaan keturunan Kromo Baru lebih dari 100 tahun, karena pemilih di Desa Sumberarum masih memiliki hubungan kekerabatan yang dapat memengaruhi perolehan suara. Kepala desa terpilih dalam hal ini adalah golongan elite desa yang berasal dari golongan trah kepala desa (trah Kromo Baru). Kepala desa terpilih dalam hal ini berhasil menjaga kesadaran hubungan patron-klien warga dari jasa orang tua terdahulu saat menjabat kepala desa. Bertahannya kekuasaan dari trah Kromo Baru karena menggunakan sumber kekuasaan berupa mitos yang dikembangkan oleh kerabat dan adanya hubungan patron-klien antara kepala desa terpilih dengan pemilih yang masih memiliki hubungan kekerabatan.

Tabel 1 menunjukkan bahwa akhir dominasi oligarki kepala desa Sumberarum dari trah Kromo Baru berakhir setelah masa kepemimpinan kepala desa Muniroh (2013 -2019) yang juga sebagai istri Ciptono (Kepala Desa Sumberarum 1999 – 2013). Kegagalan Muniroh untuk maju kembali menjadi kepala desa dikarenakan beberapa hal, diantaranya lemahnya kepemimpinan, adanya perangkat desa yang masih berasal kerabat trah Kromo Baru yang kurang mendukung kepemimpinan Muniroh, dan adanya anggapan kepemimpinan Muniroh dikendalikan oleh suaminya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Kepala Desa menjabat selama 8 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Peraturan perundangan ini tidak memungkinkan Ciptono mencalonkan kembali, dan akhirnya Muniroh (istri) didukung untuk mengikuti pemilihan kepala desa 2013 dan terpilih untuk masa jabatan 2013 – 2019.

Berbeda dengan Ciptono yang dapat menjadi kepala desa selama dua periode, Muniroh tidak mampu maju

sebagai kandidat kepala desa untuk periode kedua. Kemenangan Ciptono yang kedua karena dianggap telah berhasil membangun Desa Sumberarum pada periode sebelumnya. Pemilihan Kepala Desa 2019, Ciptono kembali mencalonkan diri dan ternyata dimenangkan oleh pesaing tunggalnya, yaitu Narto (2019 – 2027).

Kekalahan Ciptono semakin memperkuat runtuhnya trah Kromo Baru. Kekalahan ini sekaligus menjadi babak baru Desa Sumberarum yang dipimpin oleh kepala desa dari luar trah Kromo Baru. Masyarakat Desa Sumberarum lebih rasional dalam pemilihan kepala desa dan mulai meninggalkan mitos-mitos yang selama ini berkembang di kalangan trah Kromo Baru. Rasionalitas pemilih semakin diperkuat dengan adanya gejala transaksi sosial antara calon legislatif dalam pemilihan legislatif (Pileg) dan calon bupati dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pileg dan Pilkada yang sangat transaksional, ternyata tanpa disadari berpengaruh juga pada pemilihan kepala desa. *Nomor Piro Wani Piro* (NPWP) atau terima uangnya, pilih calon yang berani memberi uang dalam nominal yang besar, yang biasanya terjadi dalam Pileg dan Pilkada, akhirnya juga terjadi pada pemilihan kepala desa.

Runtuhnya Oligarki Politik Lokal

Oligarki dan politik elit lokal di desa senantiasa mengikuti pola siklus di mana kekuasaan selalu dominan dalam setiap pemilihan kepala desa. Oligarki dan elit lokal sering kali menyebabkan terjadinya politik kekerabatan dalam kepemimpinan desa. Meskipun politik kekerabatan tidak menjamin kemenangan mutlak dalam pemilihan kepala desa, namun realitas ini tidak sehat bagi proses demokratisasi di tingkat lokal. Politik kekerabatan yang terjadi di Desa Sumberarum telah berlangsung lebih dari 100 tahun yang dikuasai orang-orang dari

kerabat trah Kromo Baru. Bertahannya trah Kromo baru lebih dari 1 abad dikarenakan adanya faktor geneologi, kultural, dan sosiologis. Meskipun, pada akhirnya kekuasaan trah Kromo Baru pada akhirnya tumbang. Salah satu penyebab berakhirnya oligarki trah Kromo Baru adalah kepemimpinan yang lemah oleh kepala desa perempuan, yaitu Kepala Desa Muniroh (istri Ciptono).

Lemahnya kepemimpinan Muniroh, diperparah adanya perangkat desa yang pada pemilihan kepala desa berikutnya (2019), memilih kandidat di luar trah Kromo Baru. Selain itu adanya kombinasi norma-norma patriarki yang ditandai dengan 'cawe-cawe' suami Muniroh, dianggap kepemimpinannya selalu dalam bayang-bayang kesuksesan laki-laki. Faktor-faktor ini mengakibatkan kepemimpinan Muniroh menghadapi pertentangan, memiliki lebih sedikit wewenang dalam pengambilan keputusan, dan berpotensi terpinggirkan dalam pemerintahan desa.

Dalam perspektif gender, Muniroh sebagai kepala desa perempuan di Desa Sumberarum digambarkan sebagai pemimpin perempuan yang lemah atau didorong oleh emosi, sehingga legitimasi kepemimpinannya dipertanyakan. Persepsi ini dapat menyebabkan penolakan dari penduduk desa pada pemilihan kepala desa periode berikutnya. Hal ini diperkuat dengan tidak mencalonkan kembali Muniroh pada pemilihan kepala desa 2019. Justru suaminya (Ciptono) mencalonkan kembali, meski pada akhirnya kalah dan tidak terpilih menjadi kepala desa.

Indonesia saat ini telah memiliki produk peraturan perundangan yang memberikan kesempatan yang sama pada perempuan dalam politik, termasuk dalam pemilihan kepala desa. Dalam kenyataannya, kepemimpinan perempuan di desa sering mengalami hambatan. Kepemimpinan Muniroh tidak hanya 'diganggu' oleh perangkat desa yang

kecewa, tetapi juga diganggu oleh kelompok-kelompok kepentingan di Desa Sumberarum. Kelompok kepentingan ini berebut pengaruh untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Desa Sumberarum.

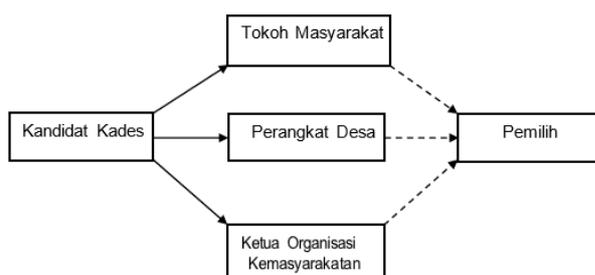
Tekanan yang dialami Muniroh sebagai kepala desa perempuan, menyebabkan keputusan untuk tidak mencalonkan kembali. Kepala desa perempuan yang lemah dapat merusak legitimasi dan efektivitas tata kelola lokal, menghambat pengembangan partisipasi dan representasi yang demokratis. Ketika kepala desa perempuan terpinggirkan atau tidak mampu secara efektif mewakili kebutuhan konstituen, hal itu dapat mengurangi kepercayaan.

Rasionalitas dan Transaksional dalam Pilkadaes Sumberarum 2019

Pemilihan kepala desa Sumberarum 2019 merupakan babak baru dinamika politik lokal. Pilkadaes tahun 2019 yang dimenangkan oleh kandidat atas nama Narto yang bukan dari trah Kromo Baru, menandai runtuhnya politik oligarki di Desa Sumberarum. Mitos yang sempat berkembang sampai 1 abad, bahwa kepala desa Sumberarum harus berasal dari trah Kromo Baru, berubah seiring semakin rasionalnya pemilih. Rasionalitas pemilih diekspresikan dalam bentuk pertukaran sosial dengan kandidat kepala desa. Beberapa temuan penelitian tentang pertukaran sosial yang terjadi pada saat Pilkadaes 2019 dapat dijelaskan dari tipe pertukaran sosial, unsur-unsur pertukaran sosial, arena pertukaran sosial, dan pola pertukaran sosial (Ciptono, 2021).

Tipe pertukaran sosial antara kandidat dengan pemilih, meliputi tipe pertukaran sosial secara langsung dan tidak langsung. Pertukaran sosial langsung adalah pertukaran yang melibatkan kandidat dengan pemilih. Pertukaran sosial langsung dapat diformulasikan "kandidat

memberi kepada pemilih dan pemilih menerima dari kandidat”. Pertukaran sosial tidak langsung dapat diformulasikan “kandidat memberi kepada, untuk diberikan kepada pemilih”. Formulasi tersebut dapat disederhanakan dengan kandidat – tokoh masyarakat – perangkat desa – ketua organisasi kemasyarakatan – pemilih. Tipe pertukaran sosial tidak langsung dapat digambarkan seperti gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Tipe Pertukaran Sosial Tidak Langsung

Unsur-unsur pertukaran sosial antara kandidat dan pemilih dalam Pilkades Sumberarum 2019 meliputi: aktor pertukaran sosial (kandidat dan pemilih, kandidat dengan tokoh masyarakat), perilaku yang berorientasi pada tujuan, ganjaran (ekstrinsik dan intrinsik), biaya, dan norma-norma pertukaran sosial.

Kelima unsur tersebut merupakan prasyarat terjadinya pertukaran sosial antara kandidat dengan pemilih. Aktor pertukaran sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah kandidat (nomor urut 1 dan 2) dan pemilih, dalam hal ini adalah warga Desa Sumberarum yang memiliki hak pilih. Perilaku sosial kandidat dalam konteks pilkades Sumberarum selalu diarahkan pada tujuan untuk mendapatkan dukungan suara. Oleh karena itu, kegiatan dalam bentuk *mlawang*, *jagong*, *mayoran* merupakan perilaku sosial yang memiliki tujuan tertentu. Sementara perilaku sosial pemilih orientasi tujuannya di antaranya

mendapatkan imbalan/ganjaran atas loyalitas, dukungan dan suara yang diberikannya.

Untuk setiap dukungan suara pemilih, dalam pemahaman pemilih bukanlah sesuatu yang gratis. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa tujuan pemilih mendukung salah satu kandidat di antaranya adalah untuk mendapatkan kebanggaan, bahwa kades terpilih berasal dari dusunnya. Atau, tujuan pemilih memberi dukungan kepada salah satu kandidat adalah dalam rangka balas budi atas kebaikan yang pernah dilakukan oleh kandidat. Atau, merupakan bentuk loyalitas yang ditunjukkan pemilih kepada kandidat dari ‘trah Singo Potro’. Oleh karena itu, dalam pertukaran sosial, hubungan antara kandidat dengan pemilih tidak ada yang bersifat ‘ikhlas’, melainkan didasarkan pada tujuan tertentu yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Ganjaran ekstrinsik dalam konteks Pilkades Sumberarum 2019 dapat berupa uang, sembako, rokok, makanan, kerudung, sarung, dan peralatan olah raga. Ganjaran ekstrinsik ini perlu disediakan oleh kandidat, karena ganjaran seperti ini akan dipertukarkan dengan ‘suara’ pemilih. Ganjaran intrinsik dapat berupa kepercayaan, kehormatan, pemikiran, tenaga, waktu luang, pujian, kebanggaan, dan suara pemilih. Ganjaran inilah yang menjadi media pertukaran dalam pertukaran sosial antara kandidat dengan pemilih.

Semakin besar ganjaran yang diterima oleh kandidat dan pemilih, semakin lama dan kuat hubungan sosial akan berlangsung. Begitu pula sebaliknya, semakin tidak sesuai harapan ganjaran yang diterima oleh kedua belah pihak, maka hubungan sosial antara kandidat dan pemilih dapat berakhir. Biaya atau ancaman adalah kebalikan dari

ganjaran/imbalan. Biaya atau ancaman adalah hal-hal yang dapat merugikan hubungan pertukaran sosial. Biaya atau ancaman dalam konteks Pilkades Sumberarum 2019 dapat berupa ketidakpercayaan, kekecewaan, pengkhianatan, dan citra buruk. Bentuk ketidakpercayaan, misalnya ditemukan pada pemilih yang memiliki karakter 'bunglon'. Manusia 'bunglon' dalam konteks Pilkades Sumberarum 2019 adalah individu yang ketika dihadapan kandidat nomor urut 1 akan memberikan sanjungan, dukungan, dan pujian, serta mencela, menjelekkan, menghina kandidat nomor urut 2. Begitu juga sebaliknya, bagi 'manusia bunglon' mungkin dia akan mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi melahirkan kekecewaan kedua kandidat. Kekecewaan pemilih terhadap salah satu kandidat, dimanifestasikan dalam bentuk mempengaruhi pemilih lain agar tidak memilih kandidat yang dianggap telah mengecewakan.

Arena yang digunakan kandidat dalam melakukan pertukaran sosial dengan pemilih adalah tradisi yang berlaku di Desa Sumberarum dalam konteks Pilkades. Tradisi tersebut meliputi *mlawang*, *jagong*, *mayoran* dan *iriman*. *Mlawang* berasal dari kata *lawang* (bahasa Indonesia: pintu) yang berarti kandidat mendatangi rumah warga satu Persatu untuk memohon doa restu dan dukungannya dalam Pilkades Sumberarum 2019. *Mlawang* merupakan perwujudan *andhap asor* (berbudi luhur) dan *lembah manah* (rendah hati), bahwa sebagai kandidat perlu meminta restu pada orang yang dituakan.

Tradisi tersebut dimanfaatkan oleh kandidat untuk meminta do'a restu sekaligus dukungan dalam Pilkades Sumberarum 2019. Melalui tradisi tersebut, kandidat dapat mempertukarkan materi dan non-materi kepada pemilih. Materi yang menjadi sarana pertukaran adalah uang dan bahan sembako. Non-

materi yang menjadi sarana pertukaran adalah janji dan kebaikan/balas budi.

Jagongan adalah kegiatan informal yang dilakukan oleh beberapa orang di sela-sela waktu luang. Biasanya *jagong* dilakukan antara 3 – 7 orang di tempat-tempat seperti warung, pos ronda, rumah warga dan rumah kandidat. Pembicaraan dalam *jagong* biasanya luas sekali, tidak ada topik khusus, dan peralihan antar topik mengalir begitu saja. Namun, pada saat kandidat ikut *jagong*, maka pembicaraan diarahkan pada maksud dan tujuan menkandidatkan kades, program kerja kades, masalah-masalah yang berkembang di masyarakat, dan permohonan dukungan.

Melalui media *jagong* ini, kandidat mencoba untuk menyampaikan ide/gagasannya untuk membangun Desa Sumberarum ke depan, menyampaikan visi dan misinya secara informal, dan yang lebih penting adalah untuk mendapatkan dukungan. *Mayoran* berarti makan enak bersama-sama. Biasanya *mayoran* diselenggarakan oleh kandidat dengan mengundang warga sekitar. Sedangkan warga sekitar yang mendatangi rumah kandidat, mereka menyebutnya *endol-endol*. *Mayoran* adalah kegiatan dengan mengundang tetangga ke rumah kandidat. Di dalam kegiatan *mayoran*, kandidat sebagai tuan rumah sudah menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya *mayoran*. Tujuan tersebut adalah ingin memohon doa dan dukungannya, agar kandidat terpilih sebagai kepala desa. *iriman* merupakan kegiatan sukarela yang dilakukan oleh kandidat, namun di balik itu sebenarnya adalah bentuk pertukaran sosial antara kandidat dengan masyarakat. Uang, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan oleh kandidat, merupakan bentuk pengorbanan (biaya) yang harus dikeluarkan. Harapannya (imbalannya) agar masyarakat pada saat pemungutan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) memilih kandidat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang terwujud dalam bentuk uang (76%), barang (57%), dan jasa (58%) yang ditawarkan kepada pemilih. Analisis korelasi menunjukkan pengaruh politik uang yang sederhana pada pemilih pemula sebesar 7,6%, sementara 92,4% mendasarkan pilihan mereka pada faktor-faktor seperti usia, pendidikan, dan kepribadian kandidat. Penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara politik uang dan perilaku pemilih, khususnya di kalangan pemilih pemula, suatu area yang data empirisnya langka. Fokus penelitian pada dampak politik uang pada pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa menawarkan wawasan baru tentang kecurangan pemilu di tingkat pemerintahan daerah, khususnya di pedesaan Indonesia.

Dengan menekankan dampak politik uang yang penting namun terbatas, penelitian ini menggarisbawahi perlunya memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula dan mengadvokasi pembentukan gugus tugas tingkat desa untuk mengatasi kecurangan pemilu, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan integritas proses demokrasi lokal (Hasan dkk, 2023).

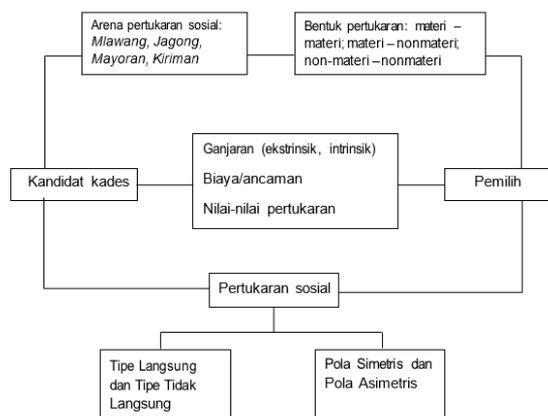
Pola pertukaran sosial dalam Pilkades Sumberarum adalah pola pertukaran sosial simetris dan asimetris. Pola pertukaran simetris antara kandidat dan pemilih terjadi manakala posisi antara keduanya sama-sama membutuhkan. Tidak ada yang mendominasi atau menguasai. Kandidat membutuhkan dukungan dari pemilih dan pemilih membutuhkan uang, sembako, dan harapan dari pemilih. Hubungan pertukaran semacam ini semakin dikuatkan oleh kenyataan bahwa keduanya sama-sama dari desa yang sama.

Pola asimetris ini terjadi karena beberapa hal: (1) salah satu pihak mendapatkan lebih sedikit dari pada pihak

yang lain; (2) salah satu pihak dapat memaksakan kehendaknya pada pihak lainnya; (3) sumber kekuasaan yang dipertukarkan dapat berupa ganjaran ekstrinsik dan intrinsik; (4) masing-masing pihak tidak memahami tujuan pertukaran sosial, dan (5) hubungan yang asimetris dapat berlangsung secara dinamis. Dalam konteks Pilkades, kandidat bisa saja menduduki posisi yang lebih tinggi dari pada masyarakat pemilih. Hal ini dikarenakan kandidat memiliki sumber daya dalam bentuk kemampuan mempengaruhi orang lain dan sumber daya keuangan.

Sebaliknya, masyarakat pemilih juga dapat berada di posisi yang lebih tinggi, manakala 'suara' yang dimiliki masyarakat pemilih, jauh lebih bermakna dan lebih mahal dibanding uang yang dimiliki kandidat. Gagasan asimetri kausal valid tetapi dapat membingungkan bila diterapkan pada relasi kekuasaan. Namun, gagasan "ketidakseimbangan" dan "manfaat yang tidak setara" memiliki kelemahan yang serius.

Konsep kekuasaan dalam pertukaran sosial antara kandidat dengan pemilih dapat melibatkan hubungan kekuasaan simetris dan asimetris. Karena hubungan pertukaran berkonotasi timbal balik dan kemungkinan - tetapi bukan kebutuhan - simetri, gagasan "ketidakseimbangan" dan "manfaat yang tidak sama" tentang kekuasaan sebagai asimetris inheren tidak cocok untuk dimasukkan dalam model pertukaran. Pertukaran sosial yang terjadi pada Pilkades Sumberarum dapat digambarkan, seperti gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Pertukaran Sosial dalam Pemilihan Kepala Desa

KESIMPULAN

Pergeseran dalam penggunaan sumber-sumber kekuasaan pada pemilihan Kepala Desa Sumberarum diklasifikasikan ke dalam tiga era, yaitu era penggunaan mitos dan spiritual, runtuhnya oligarki lokal, dan rasionalitas pemilih yang cenderung transaksional. Bertahannya kepemimpinan dari trah Kromo Baru selama 100 tahun lebih, salah satunya karena adanya mitos-mitos yang berkembang di Masyarakat dan laku spiritual dari kandidat kepala desa.

Sumber-sumber kekuasaan yang dimanfaatkan oleh kandidat kepala desa periode pemilihan 1999 sampai 2019 adalah sumber kekuasaan non-material dan material. Sumber kekuasaan non-material yang biasa digunakan oleh kandidat dari trah Kromo Baru adalah sakralisasi benda-benda pusaka peninggalan mbah Kromo Baru, ritual kejawen yang dilestarikan keluarga besar trah Kromo Baru, dan pelibatan dukun atau orang pintar.

Selain itu, kandidat juga melakukan tradisi yang biasa dilakukan oleh kandidat kepala desa dengan melakukan *mlawang*, *jagong*, *mayoran*, dan *kiriman*. Sumber kekuasaan material, di antaranya menggerakkan anggota kerabat,

memberikan uang, membagi sembako, dan bagi-bagi kaos. Runtuhnya dominasi kepala desa dari trah Kromo Baru, bermula dari kepemimpinan kepala desa perempuan yang juga masih ada kekerabatan dengan trah Kromo Baru.

Kepala desa Perempuan dianggap lemah dalam pengambilan keputusan, selalu dalam bayang-bayang keberhasilan suaminya, dan ada 'kebosanan' dari masyarakat pemilih. Runtuhnya oligarki trah Kromo Baru ditandai dengan kekalahan kandidat kepala desa dari trah Kromo Baru, karena adanya pergeseran cara berpikir pemilih dari yang awalnya tradisional berubah menjadi rasional. Dari yang awalnya terikat oleh mitos-mitos, berubah menuju transaksional. Pada akhirnya, pemilihan kepala desa Sumberarum seperti pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah, yang cenderung rasional dan transaksional.

Keunikan pemilihan Kepala Desa Sumberarum yang selama 100 tahun lebih diwarnai dengan berkembangnya mitos dan laku spiritual, kini bergeser menjadi rasional dan transaksional. Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan dengan pengujian secara kuantitatif atas pergeseran yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa Sumberarum. Untuk memahami lebih lanjut pergeseran yang terjadi, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode etnografi atau fenomenologi untuk memperkuat temuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ciptono. (2015). Dinasti elit politik desa (Studi Kasus Dinasti Kromo di Desa Sumberarum Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban). *Thesis*. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ciptono. (2021). Pertukaran sosial antara calon kepala desa dan pemilih (Studi kasus tentang Pemilihan Kepala Desa Sumberarum 2018 Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban). *Disertasi*. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fariaty, C.N., Muhammad Tanzil Aziz, M.T., Saputra, A.C. & Utami, A.N.F. (2023). Village Democracy: Voters Perceptions in Simultaneous Village Head Elections Polewali Mandar Regency In 2021. *Musamus Journal of Public Administration*, 5 (2), 397-409. DOI: [10.35724/mjpa.v5i2.5098](https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i2.5098).
- Francisco, S.J. & Demetrio. (1977). *Ancient Philippine Myths in Archipelago*. IX, A – 41.
- Hargono, H., Rustan, A., Jambak, F., Alba, L., & Rahman, R.A. (2024). Dynamics and Challenges of Democracy in Local Elections in Indonesia and the Netherlands. *SASI*, 30 (1), 111 - 118. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i1.2017>.
- Hasan, E., Aminah, A., Hamil, H.J.H., & Mukhrijal. (2023). The Practice of Money Politics in Village Head Elections and Its Effect on The Participation Level of Beginner Voters. *Journal of Governance and Public Policy*, 10 (1), 1-12. DOI: <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.15576>
- Hatimah, A.H., Tamma, S. & Yunus, A. (2023). Peran Dukun dalam Pemilihan Kepala Desa Pasir Putih. *Palita: Journal of Social Religion Research* 8 (2), 145-154. <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita> DOI: <http://dx.doi.org/10.24256/pal.v8i2.3952>.
- Hidayat, E., Prasetyo, B., & Yuwana, S. (2018). Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik*, 4 (1), 53-86. DOI: [10.7454/jp.v4i1.193](https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.193)
- Irawan, N. & Rochmiatun, E. (2022). Relasi Dukun Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Sawah Pada Tahun 2017). *Ampera A Research Journal on Politics and Islamic Civilization* 3 (03): 202-213. DOI: [10.19109/ampera.v3i03.12844](https://doi.org/10.19109/ampera.v3i03.12844).
- Kasmat, Z., Yunus, A., & Nadir, S. (2025). Conflict Dynamics and Resolution in Chief of Village Elections: A Case Study of Maradekaya Village. *Journal of Peace, Security and Democracy*, 1 (1), 16–36. Retrieved from <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jpsd/article/view/42521>.
- Peursen, C.A. van. (1976). *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Gunung Mulia (Terjemahan Dick Hartoko).
- Rahma, N.A., Kasanah, N., Arisa, N., & Mahdi, M. (2023). Political Power Dynamics in the Formulation of Village Head Term Extension Policies. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 8 (2), 263-273. DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v8i2.3475>
- Rahman, D.A., & Sriwahyuni, N. (2022). Dynamics of Local Political Democracy in Indonesia. *Science, Technology & Public Policy*, 6 (2), 81-85. <https://doi.org/10.11648/j.stpp.20220602.14>

- Resky S, M., Mustanir, A., Barisan, B., Ahmad, J., & Jermisittiparsert, K. (2023). Local Political Dynamics in Village Head Elections in Damai Village, Sidenreng Rappang Regency, Indonesia. *ARISTO*, 12 (1), 102 - 120. doi:<https://doi.org/10.24269/ars.v12i1.7637>
- Samuel, R. & Thompson, P. (1993). *The Myths We Live*. England: Clays Ltd.
- Soeseno, N. (2015). Contentious Politics di antara Dua Kota di Pantai Barat Norwegia Terkait Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bersama. *Jurnal Politik* 1 (1): 5-38. DOI: [10.7454/jp.v1i1.13](https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.13).
- Susanti, M. H. (2018). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1 (2), 111-119. DOI: [10.31000/jgcs.v1i2.440](https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440)